



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN KEMBALI IZIN PT. KARTIKA UTAMA
SEBAGAI PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, setelah diadakan penelitian persyaratan **PT. Kartika Utama** yang dimaksud dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan kembali sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan Keputusan Menteri Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 601);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN KEMBALI IZIN BIRO PERJALANAN WISATA PT. KARTIKA UTAMA SEBAGAI PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS.**
- KESATU** : Menetapkan Kembali Izin **PT. Kartika Utama** dengan Nomor Izin: PHU/HK.3098/IX/2011 yang dipimpin oleh **Yusuf Dedi Fachroni selaku Direktur** beralamat di Jl. Tantina I No. 23 RT. 18 Kel, Bandara, Kec. Sungai Pinang, Samarinda. Telepon 0541-747444. e-mail: rizamakkah@yahoo.co.id sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.
- KEDUA** : Hak dan Kewajiban **PT. Kartika Utama** sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, serta segala aturan yang masih berlaku.
- KETIGA** : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengendalian pelaksanaan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA**.
- KEEMPAT** : Penetapan kembali Izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditetapkan kembali apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA ...

- KELIMA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/547 Tahun 2011 tanggal 22 September 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2015

a.n. MENTERI AGAMA
DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

ttd

ABDUL DJAMIL